

## **Dinamika Sekretariat Bersama Golongan Karya (1965-1971)**

**Damar Erlangga<sup>1</sup>, Abrar<sup>2</sup>, Nurzengky Ibrahim<sup>3</sup>**

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta,  
15des98@gmail.com <sup>1</sup>

### **Abstrak**

Sejarah pemerintahan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan partai politik di setiap masanya. Pasca kemerdekaan muncul banyak partai politik yang berupaya mewakili kepentingan kelompoknya. Salah satu partai politik yang berkembang dengan cepat adalah Sekber Golkar. Sekber Golkar menjadi partai politik yang berkembang dengan cepat terutama setelah Soeharto menggunakannya sebagai alat politik kekuasaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya faktor penting dari berpengaruhnya Golkar masa Orde Baru, yaitu dinamika internal di dalam tubuh Sekber Golkar. Dalam penelitian ini membahas adanya sejarah munculnya Sekber Golkar yang berasal dari ide kalangan Angkatan Darat, persetujuan Angkatan Darat dengan PKI, nilai penting Sekber Golkar, peran Soeharto dalam Sekber Golkar, perkembangan Sekber Golkar masa transisi kekuasaan, integrasi internal Sekber Golkar, dan partisipasi Sekber Golkar dalam politik. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian historis analisis dengan menggunakan teori situasi historik untuk membantu penyusunan kerangka analisis tentang penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Sekber Golkar menjadi penting bagi kekuasaan Soeharto karena terbentuk dari unsur-unsur militer dan sipil yang menentang dominasi PKI. Sebagai organisasi yang baru dibentuk, Sekber Golkar juga mampu dikontrol dengan baik oleh penguasa Orde Baru agar mendukung kebijakan yang dibuat olehnya. Guna membuat Sekber Golkar sejalan dengan penguasa Orde Baru, dilakukanlah serangkaian intervensi seperti menyingkirkan orang-orang yang pro Sukarno dari internal Sekber Golkar, Pengelompokan ormas-ormas dan keterlibatan unsur sipil yang mendukung Sekber Golkar agar memenangkan pemilu tahun 1971. Sekber Golkar kemudian berubah dari yang sebelumnya merupakan organisasi federatif yang terdiri dari banyak ormas-ormas menjadi organisasi kesatuan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru. Hal ini menandai awal dari dominasi Golkar dalam politik Indonesia.

**Kata Kunci :** *Sekber Golkar, Politik, Orde Baru*

### **Abstract**

*The history of the Indonesian government cannot be separated from the history of the development of political parties in each period. After independence, there were many political parties that tried to represent the interests of their groups. One of the rapidly growing political parties is the Golkar Secretary. Sekber Golkar became a political party that developed rapidly, especially after Suharto used it as a political tool for his power. This study aims to reveal the existence of an important factor in the influence of Golkar during the New Order era, namely the internal dynamics within the Golkar Secretariat. This study discusses the history of the emergence of the Golkar Secretariat originating from the ideas of the Army, the Army's feud with the PKI, the importance of the Golkar Secretariat, Suharto's role in the Golkar Secretariat, the development of the Golkar Secretariat during the transition of power, the internal integration of the Golkar Secretariat, and the participation of the*

*Golkar Secretary. in politics. The method used is historical research method analysis using historical situation theory to assist in the preparation of an analytical framework for this research. The results of this study indicate that there is an important role for civilian groups in the success of Golkar during the New Order, not only showing the success of military groups. The Golkar Secretariat as a newly formed organization became another important factor in why Suharto was able to influence and rule at the Golkar Secretariat until the end of his power in 1998.*

**Keywords :** *Golkar Secretary, Politics, New Order*

## A. Pendahuluan

Dalam hakikatnya, politik adalah arena persaingan antar kekuatan dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan (*power*) (Gaffar, 1993). Politik di Indonesia pasca kemerdekaan menunjukkan adanya dinamika tersendiri. Dinamika sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada lingkungan suatu kelompok atau kehidupan masyarakat. Dalam hal politik, dinamika politik setiap pemimpin yang berkuasa mengalami rintangan masing-masing selama kepemimpinannya. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia mengalami masa Demokrasi Terpimpin dimana Presiden Soekarno berkuasa penuh atas jalannya kontrol pemerintahan. Kontrol pemerintahan yang kuat ini pula membuat dinamika politik Indonesia pada masa itu terlihat condong pada keputusan yang dibuat oleh Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno pada periode 1950-an melihat situasi politik Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer dimana partai politik hanya mengutamakan kepentingan partai semata dan kurang memperhatikan kepentingan bangsa (Gaffar, 1993) menjadi sebuah permasalahan politik pada saat itu. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut dibentuklah yang disebut sebagai Golongan Fungsional yang merupakan kumpulan dari golongan-golongan profesi dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Bagi Soekarno, golongan fungsional merupakan bentuk perwakilan yang lebih baik dan juga cara menyerang partai secara tidak langsung daripada membuat rencana untuk membubarkannya (Reeve, 2013). Pembentukan Golongan Fungsional ini meskipun menjadi jalan tengah dari dinamika politik Indonesia pada saat itu,

namun sikap pertentangan antar partai politik masih terjadi.

Pada periode 1960-an Presiden Soekarno menetapkan prinsip politik dalam negeri Indonesia yakni NASAKOM (Nasionalis, Agamis, Komunis) yang diterapkan Presiden Soekarno guna mencapai tujuan revolusi nasional. Apa yang disebut sebagai NASAKOM secara institusional masih belum jelas, selain memberikan pembenaran bagi eksistensi partai (Reeve, 2013). Kemunculan prinsip politik NASAKOM ini dipandang sebagai keberpihakan Presiden Soekarno terhadap pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu merupakan salah satu partai yang mempunyai basis pendukung yang cukup besar dan menjadi pihak yang mendukung gagasan Demokrasi Terpimpin Soekarno. Ide NASAKOM ini begitu penting sehingga menjadi program politik Partai Komunis Indonesia (PKI) (Reeve, 2013). Pengembangan dari ide NASAKOM ini kemudian berkaitan erat dengan sejarah Sekber Golkar.

Pada masa awal penataan sistem politik Orde Baru, Sekber Golkar merupakan organisasi baru yang tidak memiliki pengalaman dalam kegiatan politik. Situasi politik di Indonesia pada saat itu juga tidak memungkinkan untuk mengembangkan sebuah organisasi aktif dalam kegiatan politik. Penguasa Orde Baru saat itu berfokus pada membersihkan kelembagaan politik dari tokoh-tokoh terkait dengan PKI dan ormas *underbounya* (Effendy et al., 2012). Pembersihan lembaga politik dari unsur PKI pada perkembangannya tidak membuat penguasa Orde Baru merasa puas. Penguasa Orde Baru tetap

membutuhkan kekuatan politik tersendiri yang terlepas dari pengaruh partai politik lama. Meskipun terdapat beberapa partai yang digadang-gadang akan menjadi alat politik penguasa Orde Baru, pilihan tersebut dijatuhkan pada Sekber Golkar. Pemilihan Sekber Golkar menjadi sebuah langkah yang dipandang beresiko mengingat pada saat itu Sekber Golkar bukan kekuatan besar dan organisasi baru dalam pentas politik di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan kaidah keilmuan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini akan disajikan menggunakan model deskriptif-analisis yaitu, penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis dalam penelitian ini (Kartodirjo, 1993) lalu menganalisa berdasarkan fakta-fakta berserta sumber yang ditemukan. Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah seperti yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk yaitu *heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan atau historiografi* (Gottschalk, 1986).

### **1. Pengumpulan Sumber (Heuristik)**

Pada tahapan heuristik ini, sumber menurut bahannya terbagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis atau dokumen dan artefak (Kuntowijoyo, 2013). Dalam penelitian ini pula peneliti menggunakan dua jenis sumber tertulis yaitu berupa sumber primer dan sekunder.

Adapun sumber primer yang digunakan yaitu ARSIP Surat Keputusan No. Kep-107/SEKBER GOLKAR/ 1969 tentang peralihan tanggung jawab pimpinan Sekber Golkar pusat dalam soal konsolidasi organisasi Sekber Golkar. Adapun sumber primer dalam bentuk surat kabar, antara lain Surat Kabar Berita Yudha Edisi Pusat dengan judul "*Semua Panglima keempat Angkatan supaya bantu perkembangan dan penunaian tugas Sekber Golkar*" pada Rabu 14 September 1966, Surat Kabar Kompas dengan judul "*Madjen Ali Murtopo tentang Golkar*"

pada Selasa 11 Mei 1971. Adapun sumber sekunder yang digunakan adalah *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik* karya Leo Suryadinata, "*Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*" karya Jusuf Wanandi, "*Beringin Membangun: Sejarah Politik Partai Golkar*" karya Bahtiar Effendy dkk, dan *Golkar Sejarah Yang Hilang : Akar Pemikiran & Dinamika* karya David Reeve.

### **2. Kritik Sumber Sejarah (Verifikasi)**

Verifikasi terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstren dan kritik intren. Kritik sumber bertujuan untuk mencari otentisitas atau data-data yang diperoleh melalui kritik intren dan ekstren (Abdurrahman, 1999). Pada tahapan kritik ekstern ini peneliti memperhatikan tanggal terbit dan pengarang buku, artikel serta penerbit koran yang menjelaskan tentang dinamika Sekber Golkar pada masa peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru. Peneliti mencermati dan memahami isi buku dan artikel tersebut dengan mencermati tanggal dan waktu terbit koran *Berita Yudha* dan *Kompas*. Sedangkan, dalam tahap mengkritik sumber secara intern peneliti memperhatikan isi dari sumber yang telah ditemukan. Dalam hal kritik intern ini peneliti berusaha memahami dan membandingkan isi dari buku, artikel serta koran sebagai contoh buku yang ditulis oleh David Reeve "*Golkar Sejarah Yang Hilang : Akar Pemikiran & Dinamika*" dimana menjabarkan bahwa kemunculan Golkar bermula dari pemikiran Soekarno pada tahun 1950-an yang jauh sebelum dinyatakan resmi menjadi Sekber Golkar pada tahun 1964 dengan buku "*Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*" yang menyoroti pembentukan Sekber Golkar berasal dari keinginan militer untuk membendung pengaruh komunis pada awal 1960-an.

### **3. Interpretasi**

Interpretasi atau bisa disebut penafsiran merupakan tahapan dari seorang peneliti dalam menyeleksi sekumpulan data hingga menghasilkan sebuah penulisan yang berasal dari fakta

yang terbukti kebenarannya dan disusun menjadi sebuah rangkaian peristiwa. Menurut Kuntowijoyo yang mengutip pernyataan Wilhelm Dilthey bahwa interpretasi memiliki dua pengertian yakni *hermeneutics* yang berarti menafsirkan dan *verstehen* yang berarti mengerti (Kuntowijoyo, 2008). Interpretasi yang dilakukan yakni dengan melihat pada fakta sejarah bahwa pembentukan Sekber Golkar terjadi pada masa transisi politik orde lama. Dengan menggunakan teori situasi historik maka peneliti menafsirkan bahwa terdapat perubahan yang terjadi di masyarakat untuk membentuk Sekber Golkar pada saat itu (1965-1971).

#### 4. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Tahap terakhir yaitu historiografi berupa proses penulisan yang dituliskan dalam bentuk skripsi. Penelitian yang disajikan menggunakan deskriptif analisis, yaitu penulisan sejarah yang disusun berdasarkan kronologis peristiwa dengan memperhatikan sebab-akibat pada peristiwa serta menganalisa berdasarkan sumber-sumber yang didapat hingga menjadi sebuah peristiwa yang kronologis.

#### C. Tinjauan Penelitian

Penelitian mengenai sejarah perkembangan Golkar sebelumnya telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Rohullah Ali Khamenei dalam skripsinya yang berjudul *“Perkembangan Organisasi Golongan Karya (GOLKAR) : Suatu Kajian Historis Tahun 1964 - 1997”* (2013) yang menjelaskan perkembangan Golkar dari awal berdiri hingga berakhirnya pemerintahan Soeharto. Penelitian serupa tentang organisasi yang terdapat dalam Sekber Golkar juga dilakukan oleh Irpa Harsaksila dalam skripsinya yang berjudul *“Sepak Terjang SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) di dalam SEKBER GOLKAR (Sekretariat Bersama Golongan Karya) Tahun 1960-1963”* (2015) yang menjelaskan peranan SOKSI dalam pembentukan Sekber Golkar. Penelitian yang membahas keterlibatan tokoh dalam Sekber Golkar juga dilakukan oleh Dwi Setiyono dalam skripsinya yang berjudul *“Peranan Ali Moertopo Dalam Mewujudkan*

*Stabilitas Politik Pada Masa Pemerintahan Soeharto 1966-1984”* (2014) yang menjelaskan peran Ali Moertopo sebagai orang kepercayaan Soeharto membentuk situasi politik yang kondusif dengan kekuasaan yang ia miliki dengan melibatkan Sekber Golkar sebagai kekuatan politik baru. Penelitian serupa yang membahas sejarah perkembangan dari Golkar ditulis oleh Ronggur Raja Doli Simorangkir dalam tesisnya yang berjudul *“Dari Golongan Fungsional Menjadi Mesin Pemilu: Golkar Di Kota Medan 1964-1971”* (2019) yang menyoroti perkembangan Sekber Golkar di Medan yang menunjukkan keunikan tersendiri dibandingkan perkembangan Sekber Golkar di daerah lainnya, terutama di Sumatera.

#### D. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Perseteruan Angkatan Darat dengan PKI

Militer di Indonesia, terutama Angkatan darat memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia. Keterlibatan militer dalam pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari penerapan konsep “Jalan Tengah” yang digagas oleh Nasution (Prasetyadi, 2021). Dengan konsep tersebut militer mampu mempengaruhi situasi politik Indonesia, termasuk persaingan dengan PKI. Perselisihan Angkatan Darat dengan PKI tak dipungkiri merupakan persaingan untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan politik di Indonesia. Persaingan kedua pihak tersebut mempengaruhi situasi perpolitikan Indonesia pada masa akhir Orde Lama. Gagalnya sistem Demokrasi Liberal membuat banyak kalangan menilai pemerintahan yang berjalan perlu untuk diperbaiki. Sistem politik yang kacau balau pada masa Demokrasi Liberal membuat Angkatan Darat yang mempunyai kekuatan politik di tengah masyarakat berupaya memunculkan alternatif dari permasalahan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan presiden Soekarno yang “gerah” terhadap situasi politik pada masa Demokrasi Liberal, dimana partai politik hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri. Guna mengatasi hal tersebut, presiden Soekarno membentuk sebuah kelompok yang pada akhirnya disebut sebagai Front Nasional pada 10 Februari 1958.

Tujuan awal dari pembentukan Front Nasional adalah sebagai wadah perjuangan

menghadapi Belanda dalam masalah Irian Barat (Bulkin, 1991), akan tetapi Front Nasional ini berjalan tidak sesuai yang dihendaki Soekarno karena hanya menjadi wadah perjuangan untuk kalangan militer semata. Untuk itu, Soekarno menginginkan adanya sebuah Front Nasional baru yang bisa menampung seluruh kekuatan rakyat dalam rangka membebaskan Irian Barat.

Pembentukan Front Nasional baru pun terbentuk pada tahun 1960. Harold Crouch mengutip Lev menyebutkan Front Nasional ini dibentuk pada tahun 1960 untuk memobilisasi seluruh partai politik dan organisasi-organisasi yang lain termasuk angkatan bersenjata, dibelakang politik pemerintah (Crouch, 1999). Front Nasional dirancang sebagai kekuatan baru di masyarakat di mana unsur-unsur utamanya adalah golongan fungsional (Effendy et al., 2012). Semenjak kembalinya konstusi negara ke UUD 1945 dan berjalannya Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno, Angkatan Darat secara resmi menyatakan diri sebagai golongan fungsional (Bulkin, 1991). Keterlibatan Angkatan Darat sebagai golongan fungsional kedalam Front Nasional ini ditegaskan oleh Awad Bahasoan mengutip pernyataan H. Feith:

*ABRI sebagai golongan fungsional maupun sebagai alat revolusi mengambil bagian dalam membicarakan masalah-masalah di dalam suatu keluarga besar Indonesia. TNI sebagai suatu golongan fungsional tidaklah sama dengan TNI sebagai alat Pertahanan semata-mata. Sebagai alat peranan TNI hanya aktif dalam suatu bagian kegiatan bangsa saja. Sedangkan sebagai golongan fungsional TNI mengambil bagian dalam seluruh segi perjuangan bangsa dengan kelompok-kelompok fungsional lainnya (Bulkin, 1991).*

Dengan adanya pernyataan tersebut semakin menegaskan keterlibatan kalangan militer terutama Angkatan Darat dalam seluruh aspek masyarakat di Indonesia, termasuk di dalamnya pada bagian politik. Dengan adanya pernyataan tersebut semakin menegaskan keterlibatan kalangan militer terutama Angkatan Darat dalam seluruh aspek masyarakat di

Indonesia, termasuk di dalamnya pada bagian politik. Munculnya Angkatan Darat sebagai sebuah kekuatan politik perlu melihat pada keterlibatan mereka dalam masyarakat. Angkatan Darat telah menempatkan dirinya baik sebagai kekuatan militer maupun politik yang sejarahnya memang tentara memainkan peran politik yang penting (Crouch, 1999). Angkatan Darat memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan non politik yang berperan besar dalam kepentingan nasional. Angkatan Darat dalam hal ini mampu memainkan peran sebagai pelindung bagi masyarakat agar tujuan nasional bisa tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dengan peran aktif Angkatan Darat dalam menyelesaikan pemberontakan di banyak daerah yang mengancam kesatuan Indonesia seperti DI/TII dan Permesta. Dengan penilaian masyarakat seperti itu membuat Angkatan Darat tampil sebuah kekuatan politik yang kuat dan berpengaruh selama kekuasaan Soekarno.

Dalam Front Nasional, cita-cita Soekarno untuk menyatukan berbagai kekuatan politik saat itu memunculkan konflik dalam diam antara Angkatan Darat dan PKI. Menguatnya peranan dan pengaruh politis kekuatan massa PKI dinilai sebagai ancaman potensial oleh Angkatan Darat. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari sikap anti partai dari kalangan militer jauh pada saat terjadinya Revolusi Fisik (Bulkin, 1991). Ingatan tentang pemberontakan DI/TII (Selfi, 2020) dan PKI yang terjadi pada tahun 1948 di Madiun menjadi sebuah ingatan historis dari perlawanan yang dilakukan oleh PKI. Oleh sebab itu, Angkatan Darat berusaha keras membendung laju perkembangan PKI dengan berbagai cara, antara lain dengan membentuk berbagai forum kerja sama yang melibatkan golongan - golongan fungsional anti komunis untuk memperkuat basis perlawanan terhadap PKI (Tandjung, 2008). Pembentukan forum kerja sama yang dilakukan oleh Angkatan Darat membentuk SOKSI, KOSGORO dan MKGR yang dikenal sebagai kelompok Trikarya untuk mengimbangi kekuatan PKI dalam hal pengerahan organisasi massa.

Nasution sebagai pimpinan Angkatan Darat sedari awal menunjukkan ketidaksukaan terhadap perkembangan PKI di perpolitikan Indonesia. Gagasan-gagasan politik seperti membentuk Angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani yang diberikan

oleh PKI dinilai oleh Nasution mengubah tatanan politik Indonesia. Meskipun Nasution ingin dengan segera menyingkirkan PKI, namun PKI berlindung dibalik Soekarno yang memiliki pamor dan legitimasi kekuasaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Nasution. Otoritas Soekarno sebagai Presiden masih memiliki peran kuat dalam dinamika politik saat itu.

Hubungan antara Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat didasarkan pada kesadaran bersama bahwa salah satu pihak tidak dapat meremehkan pihak lainnya (Crouch, 1999). Kekuatan politik para pemimpin Angkatan Darat seperti Nasution didasarkan pada suatu organisasi yang meliputi seluruh negara yang mampu menggunakan kekuatan yang berada di bawah kontrol mereka, adalah kenyataan yang harus diterima presiden. Di pihak lain, para pemimpin Angkatan Darat harus pula mengakui pengaruh Soekarno sebagai presiden yang telah menancapkan pengaruh kekuasaannya di pemerintahan. Mereka juga mengetahui bahwa presiden Soekarno memiliki pendukung di hampir seluruh partai politik dan ini menyebabkan mereka memandangnya sebagai penghalang utama bagi pemaksaan-pemaksaan tindakan militeristis. Lebih dari itu, para perwira Angkatan Darat juga menyadari popularitas presiden di banyak bagian korps perwira, hal yang mana menyebabkan kesetiaan di kalangan perwira pun terbagi-bagi (Crouch, 1999). Oleh karenanya, baik Presiden Soekarno maupun pemimpin Angkatan Darat memilih untuk mencari jalan alternatif dalam hal pembagian kekuasaan daripada melakukan upaya untuk membangun suatu persaingan kekuasaan yang tidak menemukan akhir.

Dengan adanya pernyataan tersebut semakin menegaskan keterlibatan kalangan militer terutama Angkatan Darat dalam seluruh aspek masyarakat di Indonesia, termasuk di dalamnya pada bagian politik. Munculnya Angkatan Darat sebagai sebuah kekuatan politik perlu melihat pada keterlibatan mereka dalam masyarakat. Angkatan Darat telah menempatkan dirinya baik sebagai kekuatan militer maupun politik yang sejarahnya memang tentara memainkan peran politik yang penting (Crouch, 1999). Angkatan Darat memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan non politik yang

berperan besar dalam kepentingan nasional. Angkatan Darat dalam hal ini mampu memainkan peran sebagai pelindung bagi masyarakat agar tujuan nasional bisa tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dengan peran aktif Angkatan Darat dalam menyelesaikan pemberontakan di banyak daerah yang mengancam kesatuan Indonesia seperti DI/TII dan Permesta. Dengan penilaian masyarakat seperti itu membuat Angkatan Darat tampil sebuah kekuatan politik yang kuat dan berpengaruh selama kekuasaan Soekarno.

Dalam kurun waktu 1964 hingga 1965 PKI mengalami kemajuan pesat ditengah konfrontasi dengan Malaysia (Crouch, 1999). Namun ditengah kemajuan tersebut menyisakan permasalahan internal dikalangan para pimpinan PKI. Para pemimpin PKI benar-benar menyadari bahwa partai mereka amat mudah dikalahkan jika terjadi adu kekuatan, yaitu jika pimpinan Angkatan Darat menemukan permasalahan yang memungkinkan mereka menggunakan kekerasan. Selama Presiden Soekarno masih memakai pengaruh PKI untuk membatasi dominasi kelompok-kelompok Angkatan Darat, pimpinan PKI masih merasa aman. Tetapi mereka khawatir apabila Soekarno meninggal atau menjadi tidak berdaya, atau terjadi perpecahan terbuka antara Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat. Karena itu PKI melipatgandakan upaya untuk mendapatkan sekutu dalam tubuh angkatan bersenjata, dan menggiatkan gerakan di organisasi sayapnya seperti SOBSI guna menaikkan pengaruhnya di masyarakat, terutama kelas bawah.

Melihat kegagalan yang dilakukan oleh Angkatan Darat untuk menghilangkan peranan PKI yang begitu luas membuat Angkatan Darat terpaksa turun ke bawah dengan membina organisasi sipil satu persatu (Effendy et al., 2012). Angkatan Darat kemudian melihat perselisihan yang dapat ia manfaatkan untuk memperkuat posisinya melawan PKI. Perselisihan antara Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dengan Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI) yang merupakan organisasi yang mendapat dukungan PKI adalah salah satunya. Angkatan Darat kemudian mendukung SOKSI yang sudah tergabung kedalam kelompok golongan karya yang sedari awal sudah melawan perkembangan PKI di Indonesia. Peranan

SOKSI yang menjaring para pegawai pemerintah dianggap akan menaikkan dukungan untuk Angkatan Darat disertai memang pimpinan perusahaan negara sebagian besar berlatarbelakang ABRI (Effendy et al., 2012).

Perseteraan antara Angkatan Darat dengan PKI pada akhirnya berakhir pada perebutan untuk mencapai otoritas politik. Otoritas politik dalam hal ini adalah pengaruh masing-masing pihak terhadap berjalannya pemerintahan Soekarno. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa perseteruan keduanya sebagai akibat munculnya alat kekuasaan dari kedua pihak, yakni dari PKI pada basis massa yang besar sedangkan Angkatan Darat pada kekuatan bersenjata yang dimilikinya. Perseteruan antara Angkatan Darat dengan PKI pada akhirnya berakhir pada perebutan untuk mencapai otoritas politik. Otoritas politik dalam hal ini adalah pengaruh masing-masing pihak terhadap berjalannya pemerintahan Soekarno. Perseteruan keduanya akan terlihat baik-baik saja jika tidak terkait dengan persaingan politik. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa perseteruan keduanya sebagai akibat munculnya alat kekuasaan dari kedua pihak, yakni dari PKI pada basis massa yang besar sedangkan Angkatan Darat pada kekuatan bersenjata yang dimilikinya. Situasi yang sedemikian rupa tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Sekber Golkar.

## 2. Nilai Penting Sekber Golkar

Melihat pada awal pendirian Sekber Golkar terbentuk sebagai sebuah kekuatan penentang PKI, bisa dikatakan bahwa pada awal perkembangannya belum menunjukkan hal yang signifikan terhadap upaya menentang perkembangan PKI (Suryadinata, 1992). Sekber Golkar masih menjadi organisasi yang baru dalam perpolitikan di Indonesia pada saat itu. Pemilihan Sekber Golkar sebagai sebuah kendaraan politik bagi Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya merupakan hal yang dinilai cukup beres jika melihat dari pamor Sekber Golkar dibandingkan partai politik yang ada pada saat itu.

Pasca terjadinya Pemberontakan 30 September 1965 (G30/S), Sekber Golkar menjadi organisasi yang dapat berkembang

ditengah dibatasinya kegiatan politik pasca pemberontakan G30S. Labelisasi Sekber Golkar sebagai organisasi masyarakat dalam bentuk kekaryaan menjadi alasan Sekber Golkar tidak dibatasi kegiatannya. Peran Angkatan Darat dalam Sekber Golkar juga menjadi pelindung bagi berkembangnya Sekber Golkar.

Lalu mengapa Soeharto memilih Sekber Golkar sebagai sebuah kekuatan politik perlu melihat dari latar belakang dari Soeharto, situasi politik dan Sekber Golkar itu sendiri. Hingga awal Orde Baru, tidak ada satupun partai politik yang mewakili kepentingan militer (Suryadinata, 1992). Dengan beralihnya kekuasaan kepada kelompok militer maka tidaklah mengherankan apabila Soeharto berfikir untuk menggunakan salah satu organisasi sebagai mesin pemilu untuk mempertahankan kepentingan tentara (Suryadinata, 1992). Penunjukan organisasi yang dipilih oleh Soeharto kelak tentunya merupakan organisasi yang dapat mewakili kepentingan Angkatan Darat dalam politik.

Sekber Golkar mengalami transformasi dari sebuah organisasi masyarakat menjadi organisasi yang secara mayoritas diisi oleh kalangan elit militer. Terdapat sebuah teori yang menjelaskan keterlibatan kalangan elit politik, teori tersebut mengatakan "Yang mendorong seseorang elit politik atau kelompok-kelompok elit memainkan peranan aktif dalam politik adalah adanya dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan" (Varma, 1992). Soeharto sebagai penguasa baru tentu saja memiliki kekuatan yang besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Namun, melihat peralihan kekuasaan yang tidak berjalan dengan mulus membuat legitimasi kekuasaan Soeharto masih belum diakui secara luas. Guna kekuasaan yang ia raih tersebut dapat diakui oleh khalayak dibutuhkan sebuah partai politik. Dibutuhkannya partai politik ini menjadi hal wajib ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi dimana rakyat secara harfiah menjadi pemilik kekuasaan tertinggi dan diwakili oleh partai politik.

Seperti yang dijelaskan bagian sebelumnya bahwa situasi politik Indonesia yang memunculkan perselisihan antara

Angkatan Darat dan PKI melahirkan Sekber Golkar. Pada awal pendiriannya Sekber Golkar tidak memiliki agenda dan kegiatan yang secara giat untuk melawan PKI sehingga tidak disorot oleh pemberitaan nasional. Namun dengan penyatuan berbagai organisasi dalam Front Nasional yang dihimpun menjadi Sekber Golkar menjadi sebuah kekuatan yang besar apabila mendapat dukungan dan manajemen organisasi yang tepat.

Sekber Golkar yang memang pada pendirian awalnya dimotori oleh kalangan Angkatan Darat menjadikannya organisasi ini diisi banyak kalangan perwira Angkatan Darat. Dengan latar belakang dari Sekber Golkar yang terdiri dari para perwira tinggi Angkatan Darat tersebut membawa Sekber Golkar memiliki kesamaan dengan Soeharto, yakni sama-sama berlatar belakang militer dari Angkatan Darat. Namun, perlu dicermati pula ada hal lain yang menjadi faktor mengapa Sekber Golkar dipilih oleh Soeharto sebagai alat kekuasaannya. Hal lain yang bisa dikatakan menjadi faktor tersebut adalah Sekber Golkar merupakan organisasi yang baru dibentuk. Pada penemuan fakta-fakta sejarah terkait berdirinya Sekber Golkar belum muncul figur penting yang berpengaruh di internal Sekber Golkar hingga kemunculan Soeharto sebagai figur penting didalamnya. Seperti yang ditunjukkan pada masa awal-awal Sekber Golkar dimana Soeharto yang baru saja berkuasa mampu mempengaruhi internal Sekber Golkar untuk menyingkirkan orang-orang Pro-Soekarnoisme hingga tersingkirnya Brigjen Djuhartono yang merupakan ketua umum dari Sekber Golkar sendiri. Lain halnya jika organisasi tersebut sudah lama berdiri dan memiliki dasar ideologi dan tujuan organisasi seperti intervensi pemerintah Orde Baru dalam menyatukan kekuatan politik Islam dan Nasionalisme dalam bentuk PPP dan PDI. Meskipun dapat disatukan tapi dari sisi internal keduanya tetap dikuasai oleh kelompok-kelompok lama yang memang sudah berkuasa dalam organisasi tersebut. Hal ini tampak berbeda dari Sekber Golkar yang dianggap sebagai alternatif bagi orang-orang yang tidak menyukai ideologi partai yang terkotak-kotak dan saling bersaing dengan partai lain (Reeve, 2013). Penataan dan penetapan landasan dari Sekber Golkar sendiri terbentuk setelah kelompok Pro-Soekarnoisme sudah hilang dari Sekber

Golkar dan penataan organisasi pun dimulai di masa kepemimpinan Soeprpto Sukowati. Pada akhirnya Sekber Golkar menjalankan salah satu fungsi dari partai politik, yakni fungsi dukungan (*supportive function*), yaitu “partai tidak hanya memobilisasi dan memerintah, tetapi juga harus menciptakan kondisi-kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup sistem di mana partai tersebut beroperasi.” (Amal, 1988). Dalam hal ini kehadiran Sekber Golkar dalam pentas politik membawa pengaruh penting dalam politik kekuasaan Soeharto.

Sekber Golkar pada akhirnya tampak sejalan dengan visi misi Soeharto pada masa awal Orde Baru. Kesamaan visi untuk melawan pengaruh komunisme dan PKI menjadi dasar kesamaan antara Soeharto dengan Sekber Golkar sendiri. Latar belakang Soeharto yang merupakan seorang Jenderal ABRI juga menjadi keterikatan dengan rekan-rekan militernya yang tergabung dalam Sekber Golkar. Sekber Golkar sebagai organisasi yang baru dibentuk dilihat oleh Soeharto akan mudah dikendalikan dan menguntungkan dirinya ketika ia berkuasa karena kesamaan - kesamaan yang sudah disebutkan. Sekber Golkar dinilai akan mampu menaikkan pamor serta citra Soeharto sebagai penguasa baru. Partai politik mewakili kepentingan suatu kelompok sosial ekonomi dan dengan demikian hal ini memperkuat dukungan mereka tidak hanya terhadap partai tetapi juga terhadap sistem yang mendasari beroperasinya partai tersebut.

### **3. Peran Soeharto dalam Sekber Golkar**

Menilai peranan Soeharto di dalam Sekber Golkar harus dicermati melihat ia sebagai penguasa pada saat itu. Peranan Soeharto sebagai penguasa inilah yang mempengaruhi dari perkembangan Sekber Golkar. Setelah penunjukan Soeharto sebagai presiden pada tahun 1968, ia bergerak cepat dalam menciptakan konsolidasi politik pada saat itu. Salah satu hal yang pertama kali ia lakukan dalam upayanya menciptakan konsolidasi politik adalah penataan organisasi politik, termasuk di dalamnya adalah Sekber Golkar.

Penataan organisasi politik yang dijalankan oleh Soeharto berupaya agar tidak memunculkan musuh baru dalam pentas

politik. Sekber Golkar sebagai sebuah kekuatan politik yang baru dan dipilih oleh Soeharto melakukan perombakan besar-besaran. Salah satu perombakan yang cukup besar adalah dilibatkannya kalangan sipil dalam Sekber Golkar. Kebijakan melibatkan pegawai negeri dalam Sekber Golkar dikenal dengan kebijakan monoloyalitas. Kebijakan monoloyalitas ini merupakan kebijakan yang mewajibkan pegawai negeri sipil instansi pemerintah, pejabat pemerintah non-PNS dan kalangan purnawirawan militer tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). KORPRI yang sebelumnya sudah tergabung dalam Sekber Golkar mewajibkan kepada anggotanya hanya memilih Sekber Golkar sebagai partai pilihannya. Basis massa yang besar disetai ketakutan akan posisi di dalam instansi pemerintah akan hilang membuat kebijakan yang dibuat oleh Soeharto ini sangat efektif dan berpengaruh bagi berkembangnya Sekber Golkar. Hal ini menjadi sebuah kebijakan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan Sekber Golkar.

Hal lain yang menunjukkan adanya peranan Soeharto adalah pembersihan anggota Sekber Golkar pro-Soekarno. Upaya ini merupakan dinamika awal internal tubuh Sekber Golkar. Diantara pengurus pusat Sekber Golkar masih ada nama-nama yang dianggap dekat dengan Soekarno, seperti Ketua Umum Brigjen Djuhartono (Napitupulu, 2007) yang kemudian "dibersihkan" oleh Soeharto dan digantikan oleh orang yang dikenal baik oleh Soeharto yakni Mayjen Soeprapto Sukowati. Mayjen Soeprapto Sukowati terpilih sebagai Ketua Umum Sekber Golkar pada Musyawarah Kerja Sekber Golkar Kedua pada 2-7 November 1967. Penunjukan Sukowati dipandang sebagai sebuah pergantian ketua umum yang sering dilakukan berbagai politik, namun maksud pergantian ketua umum tersebut memiliki kepentingan politik sendiri. Soeprapto Sukowati sebagai salah satu pelopor terbentuknya Sekber Golkar merupakan orang yang cukup dekat dengan Soeharto. Penunjukan ini sekaligus mendepak Djuhartono yang merupakan ketua umum Sekber Golkar sebelumnya. Erat kaitannya pencopotan Djuhartono karena ia dinilai

sebagai orang yang dekat dengan Soekarno, pihak yang ingin disingkirkan oleh Soeharto.

Dalam wawancara tertulis dengan Jusuf Wanandi, beliau memuliskan peranan Soeharto di Sekber Golkar sangat menentukan terutama secara formal Soeharto diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina dengan kuasa mutlak. Soeharto juga memegang keuangan organisasi dan DPP Golkar disediakan oleh Soeharto. Dengan posisi yang dimilikinya, Soeharto memiliki kekuatan yang besar terhadap jalannya Sekber Golkar.

Peran Soeharto sebagai penguasa baru menampilkan kesan ia sebagai figur penting di berbagai aspek, termasuk politik. Dengan perannya sebagai presiden sangat berperan dalam terciptanya alat kekuasaan, dalam hal ini pemanfaatan Sekber Golkar dalam melegitimasi kekuasaan yang ia miliki dimata masyarakat.

#### **4. Sekber Golkar Masa Transisi Kekuasaan**

Transisi kekuasaan yang muncul pada tahun 1965 hingga tahun 1968 merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik dari perubahan politik saat itu. Front Nasional yang menjadi wadah berkumpulnya berbagai macam organisasi, masih diisi oleh tokoh-tokoh PKI. Hal tersebut menjadi sasaran "pembersihan" oleh kalangan Angkatan Darat yang mendapatkan kekuasaan dari Soekarno. menjadi sasaran utama Sekber Golkar untuk disingkirkan. Dinamika politik tersebut membawa perpecahan dalam tubuh Front Nasional antara tokoh-tokoh pendukung Soekarno dengan tokoh-tokoh pendukung Angkatan Darat (Reeve, 2013). Penyingkiran mereka dilakukan dengan dinon-aktifkan dari keanggotaan dan kepengurusan Front Nasional sejak 11 November 1965 (Effendy et al., 2012).

Pada tubuh internal Sekber Golkar periode transisi kekuasaan, muncul upaya dari Sekber Golkar untuk mengadakan konsolidasi kekuatan. Hal ini diakibatkan dari situasi politik dimana partai politik selain PKI mengalami penurunan dukungan. PNI sebagai salah satu partai besar mengalami penurunan dukungan akibat dugaan sayap radikal dari partai tersebut sudah dimasuki oleh unsur-unsur PKI (Bulkin, 1991). Dengan situasi tersebut, Sekber Golkar kemudian

melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional dari tanggal 2 hingga 11 Desember 1965. Pelaksanaan Mukernas pertama Sekber Golkar ini menandai adanya keinginan untuk menyatukan kekuatan dari organisasi-organisasi dalam Sekber Golkar.

Menurut Pratigny (Pratigny, 1984) pada masa kepemimpinan Djuhartono, Sekber Golkar diarahkan untuk selalu mematuhi tujuan Sekber Golkar, yakni selalu berpedoman pada Pancasila dan tidak melakukan penyimpangan terhadap Pancasila. Dengan dukungan Angkatan Darat, Sekber Golkar yang berupaya melawan kekuatan PKI berhasil untuk meredamnya. Dukungan rakyat yang begitu masif untuk mendukung Sekber Golkar sebagai wadah kelompok Pancasila membuat pamor dari Sekber Golkar di masa kepemimpinan Djuhartono semakin luas.

Setelah mendapat dukungan yang kuat, muncul upaya dari Soeharto untuk membersihkan Sekber Golkar dari pengaruh Soekarno. Hal ini tidak bisa dilepaskan keinginan Soeharto menggunakan Sekber Golkar sebagai alat politik yang menegaskan legitimasi kekuasaannya ((Arifin et al., 2018). Dengan alasan pada Mukernas I tidak mencerminkan semangat Orde Baru, maka pada tanggal 2 sampai 7 November 1967 diadakanlah Musyawarah Kerja Nasional kedua atau Mukernas II (Effendy et al., 2012). Keinginan untuk konsolidasi ulang serta penyamaan orientasi dengan Orde Baru itu tercermin dari tema Mukernas, yaitu "Konsolidasi Golongan Karya mensukseskan program kabinet Ampera untuk memenangkan Orde Baru menuju masyarakat makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Pada struktur baru tersebut menunjukkan upaya Sekber Golkar memperkuat pengaruhnya tidak hanya di tingkatan pusat, tapi sampai pada tingkatan desa. Hal tersebut bisa dimaknai lain dengan sudut pandang yang berbeda bahwa hal tersebut menjadi cara Soeharto membangun relasi yang kuat dengan masyarakat dan menjadikan Sekber Golkar sebagai alatnya. Munculnya Sukowati sebagai ketua umum Sekber Golkar tidaklah mengherankan karena sejak awal Sekber Golkar dipimpin oleh unsur Hankam. Bahkan dalam kepengurusan

sebelumnya dibawah Brigjen Djuhartono hasil Mukernas I, Sukowati sudah menduduki posisi sebagai wakil ketua. Yang membedakan kepengurusan Sukowati dengan periode sebelumnya terletak dalam formasi kepengurusan di mana unsur Hankam tampak sangat mendominasi dan sudah bersih dari unsur-unsur periode sebelumnya. Dominasi Angkatan Darat tersebut mencerminkan kesungguhan Angkatan Darat membangun Sekber Golkar sebagai kekuatan politik yang akan terus mendukung Orde Baru. Kedekatan yang sudah dibangun sejak lama antara Sukowati dengan Soeharto dalam keanggotaan militer menjadi sebuah nilai lebih tersendiri untuk membentuk sebuah konsolidasi yang kuat dalam sebuah organisasi.

Sekber Golkar yang sedari awal terbentuk dari berbagai macam organisasi juga memiliki peranan penting dalam Sekber Golkar, terutama kelompok Trikarya yang terdiri dari KOSGORO, SOKSI, dan MKGR. Kuatnya dominasi Soeharto tersebut memunculkan kekhawatiran, terutama kelompok Trikarya yang memiliki basis pendukung yang besar. Kelompok Trikarya khawatir jika usaha Soeharto tersebut akan menghilangkan basis pendukung dari ketiga organisasi dalam Trikarya. Akan tetapi, kuatnya peranan Soeharto dalam Sekber Golkar sekali lagi membuat kekhawatiran tersebut tidak membuat reorganisasi dalam tubuh Sekber Golkar terhenti.

Dengan mengaitkannya pada Teori Situasi Historik yang menyatakan aspek krisis legitimasi menjadi faktor terbentuknya partai politik, hal ini tampak sejalan dengan situasi terbentuknya Sekber Golkar. Legitimasi kekuasaan Soeharto yang masih belum secara resmi ditunjuk sebagai presiden ditunjukannya dengan mengerahkan Sekber Golkar sebagai kekuatan politiknya. Sekber Golkar melakukan berbagai perubahan seperti reorganisasi kepengurusan bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Dengan dukungan rakyat tersebut semakin memperkuat legitimasi kekuasaan Soeharto dengan keterlibatan Sekber Golkar.

### **5. Integrasi Internal Sekber Golkar**

Setelah pelaksanaan reorganisasi tubuh internal Sekber Golkar, hal selanjutnya yang dilakukan adalah konsolidasi kuat dari

internal Sekber Golkar. Akan tetapi pluralitas yang ada dalam tubuh Sekber Golkar menjadi penghalang upaya konsolidasi. Hal penting yang dilakukan oleh pengurus pusat Sekber Golkar adalah dengan pengelompokan organisasi yang tergabung didalam Sekber Golkar. Pengelompokan dari organisasi tersebut berasal dari pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan Sekber Golkar seperti Sukowati, dr. Amino Gondohutomo dan Wartono, serta unsur Hankam yang diwakili oleh Amir Moertono. Pertemuan tersebut menghasilkan tugas pokok dari Sekber Golkar, yaitu mensukseskan pemilu dan mensukseskan pembangunan (Effendy et al., 2012). Upaya menyukseskan pemilu memerlukan soliditas yang terbangun kuat dalam internal Sekber Golkar. Oleh karenanya, dijejaki kemungkinan untuk pembentukan Kelompok Induk Organisasi (Kino) agar mudah untuk mengontrol internal Sekber Golkar tetap sesuai dengan tujuan organisasi.

Walaupun sebagian besar organisasi yang berafiliasi di Sekber Golkar adalah kalangan sipil, tetapi yang paling berpengaruh adalah yang dipimpin oleh perwira-perwira Angkatan Darat. Pimpinan dari Trikarya yang merupakan perwira senior dan pimpinan pusat Sekber Golkar sendiri yang didominasi perwira Angkatan Darat membuat Sekber Golkar terlihat sebagai sebuah organisasi dibawah komando militer. Dengan keanggotaan yang amat beragam itu Sekber Golkar lebih merupakan koordinasi "Sekretariat Bersama" daripada federasi yang mampu memaksakan sesuatu kebijakan kepada anggota-anggotanya, yang semula bersatu hanya karena sama menentang PKI (Crouch, 1999). Hal ini pada akhirnya sering memunculkan ketidakcocokan antara kebijakan yang dibuat oleh kalangan militer dan pelaksanaannya yang dilakukan kalangan sipil.

Peran aktif kalangan sipil dalam Sekber Golkar sendiri tak dapat dipungkiri merupakan kebutuhan dari kalangan militer sendiri. Walaupun Angkatan Darat sebenarnya mendominasi pemerintahan setelah tahun 1966, namun di dalam pemerintahan diikutsertakan berbagai tipe orang sipil, dengan tujuan menarik keahlian dan pengalaman mereka dan untuk menciptakan suasana atau kesan dalam negeri yang benar, serta

menciptakan gambaran yang baik terhadap negara-negara Barat yang memberikan bantuan keuangan (Crouch, 1999). Tindakan tersebut dapat dipahami mengingat tujuan dari Soeharto ketika mengawali kekuasaannya adalah perbaikan ekonomi nasional dengan megandalkan bantuan dari negara-negara barat.

Akan tetapi keterlibatan kalangan sipil terutama kalangan cendekiawan dalam Sekber Golkar merupakan sebuah pilihan yang tidak bisa dihindari. Menurut Suryadinata (Suryadinata, 1992) bahwa tidak adanya prospek bagi kalangan sipil untuk berkuasa yang membuat beberapa kalangan sipil terdiri dari teknokrat dan cendekiawan memutuskan bergabung dengan militer. Menurut pandangan mereka, dalam rangka memodernisasikan negara, kaum cendekiawan tidak punya alternatif lain kecuali masuk di dalam persekutuan dengan militer. Leo menjelaskan meskipun keputusan-keputusan penting dibuat oleh militer, tetapi masukan dari kalangan sipil juga berperan besar karena di bidang non militer kaum militer tidak punya keahlian tersebut. Aspek-aspek penting dalam suatu negara seperti perekonomian, sosial budaya merupakan bagian yang dimanfaatkan oleh Sekber Golkar untuk diisi kalangan sipil.

Salah satu kalangan sipil yang dilibatkan dalam Sekber Golkar adalah kalangan mahasiswa. Mahasiswa pada awalnya sering melakukan demonstrasi karena pemerintahan Soekarno yang mendukung adanya komunis dan kekuasaan Soekarno yang bersifat sentralistik dirasa membuat nilai demokrasi hilang, dan runtuhnya pemerintahan Soekarno dan hilangnya kekuatan PKI menjadi momentum penting untuk menata kembali cita cita demokrasi yang diinginkan kalangan intelektual dan mahasiswa. Oleh karenanya para mahasiswa terus menerus melakukan unjuk rasa semenjak terjadinya peristiwa G30 S yang memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Melihat upaya integrasi yang dilakukan oleh Sekber Golkar dengan Teori Situasi Historik menunjukkan fakta yang berbeda. Jika didalam teori menyebutkan bahwa dengan adanya situasi kritis pembentukan partai politik terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat

untuk mewujudkan integrasi di dalam masyarakat, maka pada fakta sejarah Sekber Golkar upaya Sekber Golkar mewujudkan integrasi semata untuk memenuhi tujuan organisasi, yaitu memenangkan pemilihan umum.

### **6. Partisipasi Sekber Golkar dalam Politik**

Meskipun Sekber Golkar telah direorganisasi dan orang-orang Soeharto yang ada di dalam maupun di luar Hankam telah muncul sebagai pengendali, organisasi itu masih belum merasa pasti apakah dapat meraih kemenangan dalam Pemilu Juli 1971 (Suryadinata, 1992). Mengingat pelaksanaan pemilu sudah dekat dan penguasa Orde Baru menginginkan Sekber Golkar tampil sebagai pemenang, maka Ali Moertopo yang ditugasi oleh Soeharto menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk kemenangan Sekber Golkar.

Strategi politik yang digunakan oleh Sekber Golkar dikenal dengan sebutan jalur ABG, yaitu ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Pengerahan ABRI dalam hal ini adalah unsur Hankam yang dimobilisasi untuk mendukung Sekber Golkar, Birokrasi ditunjukkan dengan pengerahan Kokarmendagri serta unsur Golkar ditunjukkan dengan mengenalkan Sekber Golkar sebagai organisasi yang mencita-citakan pembangunan nasional (Puspita, 2012). Ali pun gencar melakukan penyebaran informasi tentang Sekber Golkar kepada masyarakat, seperti menggunakan media massa (Lihat lampiran 4). Ali Moertopo kemudian menggagas pembentukan badankhusus dibawah Sekber Golkar yang bertugas memenangkan pemilu. Badan ini diberi nama Badan Pengendali Pemilu (Bapilu). Dengan terbentuknya Bapilu, Sekber Golkar memiliki keleluasaan untuk merekrut pengurus Bapilu yang berpotensi masuk dalam kepengurusan Sekber Golkar (Effendy et al., 2012).

Soeharto yang menggunakan Sekber Golkar sebagai alat politiknya mengeluarkan kebijakan Monoloyalitas kepada seluruh pegawai negeri. Mereka diwajibkan menunjukkan monoloyalitas dengan memutuskan semua hubungan dengan partai politik dan semua organisasi massanya serta secara aktif berkampanye untuk Golkar (Liddle, 1992). Kebijakan tersebut sebagian besar diikuti oleh seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk Sri Indiyah. Ancaman

yang begitu kuat jika melanggar membuat banyak orang terpaksa bergabung kedalam Sekber Golkar. Lain halnya yang ditunjukkan Indiyah yang menyebutkan bahwa masih ditemui teman-temannya menolak bergabung ke Sekber Golkar dan tetap mempertahankan partai yang didukungnya. Hal tersebut terjadi karena penilaian mereka terhadap Sekber Golkar yang merupakan organisasi baru dan latar belakang ideologi yang dimiliki pada partai-partai lama membuat mereka enggan berpindah haluan.

Menyadari bahwa Sekber Golkar tidak dapat mengakarkan diri pada rakyat seperti partai lain yang sudah ada dalam waktu setengah tahun, yaitu jangka waktu yang tersedia sebelum diadakan pemilihan umum, para perencana dalam Bapilu tidak berusaha membangun diri sebagai suatu partai politik dengan ideologinya yang tersendiri melainkan mencoba menciptakan suatu mesin perlindungan yang dapat mengambil hati pendukung-pendukung partai lain (Crouch, 1999). Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh Bapilu cenderung praktis dan melibatkan Soeharto sebagai penguasa.

Secara tidak langsung, sebelum terlaksananya Pemilu 1971 Sekber Golkar mendapat dukungan penuh dari tiga pihak, yakni Angkatan Darat yang merupakan pendukung setia dari Sekber Golkar, Kino dengan kekuatan setiap kelompoknya yang cukup besar dan Bapilu yang merancang strategi kemenangan Sekber Golkar dalam pemilu. Dukungan yang kuat tersebut tidak membuat pimpinan pusat Sekber Golkar yakin menang pemilu. Sukowati menilai bahwa yang terpenting tujuan utama dari Sekber Golkar adalah berpartisipasi aktif dalam pemilu mengingat Sekber Golkar baru pertama kali terlibat dalam pemilu.

Bagi organisasi-organisasi anggota dalam Sekber Golkar, hubungan dengan militer agar dapat menyediakan kontak yang berguna, sedangkan bagi militer hubungan ini dapat membantu menjaga kontak dengan tokoh-tokoh berwenang lokal yang kemudian memainkan peran penting dalam kampanye pemilu (Reeve, 2013). Upaya partisipatif Sekber Golkar untuk mengikuti pemilu pada akhirnya menunjukkan hubungan yang saling

menguntungkan antara pihak militer dengan sipil.

### **E. Kesimpulan**

Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR) merupakan organisasi yang dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta. Pembentukan Sekber Golkar merupakan reaksi dari situasi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang tidak stabil. Konflik antara Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi penyebab awal munculnya gagasan adanya Sekber Golkar. Sekber Golkar digunakan oleh Angkatan Darat sebagai kekuatan melawan dominasi PKI yang berkembang di masyarakat saat itu.

Pada penemuan fakta-fakta sejarah terkait berdirinya Sekber Golkar belum muncul figur penting yang berpengaruh di internal Sekber Golkar hingga kemunculan Soeharto sebagai figur penting didalamnya. Perkembangan dari Sekber Golkar sangat dipengaruhi dari kebijakan yang dibuat oleh Soeharto. Selain adanya faktor sejarah keterlibatan Angkatan Darat, hal lain yang menyebabkan Soeharto dengan mudah menggunakan Sekber Golkar karena Sekber Golkar organisasi yang baru terbentuk. Organisasi yang tidak memiliki basis ideologi yang kuat disertai berkuasanya Soeharto sebagai pejabat presiden membuat ia dengan mudah menggunakan Sekber Golkar disamping sejarah pembentukan Sekber Golkar yang berasal dari militer.

Di dalam Sekber Golkar sendiri terdapat beberapa kali dinamika internal organisasi. Pertama, pada tahun 1966 dimana terjadi gejolak antara kubu pro-Soekarno dengan kelompok Soeharto yang baru berkuasa. Kedua, pada tahun 1970 ketika intervensi kelompok Ali Moertopo dalam tubuh Sekber Golkar dan Ketiga ketika pasca kemenangan pada pemilu 1971 dimana Sekber Golkar yang berubah menjadi Golkar direorganisasi sesuai dengan gambaran pemimpin Orde Baru. Dari sekian banyaknya dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari intervensi Soeharto yang menggunakan Sekber Golkar untuk kepentingan kekuasaannya bisa diakui dengan baik di masyarakat. Konsolidasi yang kuat di tubuh internal Sekber Golkar

menjadi mutlak bagi Soeharto agar tercipta stabilitas politik yang ia inginkan.

Kepentingan kalangan sipil dan militer yang menunjukkan sikap saling tidak percaya pada akhirnya menunjukkan adanya kerjasama yang baik dilandasi keahlian masing masing pihak. Kedua pihak saling membutuhkan untuk tercapainya tujuan dari Sekber Golkar agar memenangkan pemilu pertamanya.

Terlepas dari keberhasilan dalam pemilihan umum, Golkar pada dasarnya adalah hasil ciptaan penguasa militer dan tidak dapat dipisahkan identitasnya dari mereka. Sekber Golkar berdiri tidak berlandaskan suatu organisasi partai dan tidak mempunyai akar sama sekali dalam masyarakat. Sekber Golkar adalah sebuah organisasi federasi yang majemuk yang dimobilisasi pihak tentara secara temporer dengan tujuan melemahkan lawan politik tentara, yaitu Partai Komunis Indonesia. Sekber Golkar kemudian berkembang menjadi organisasi kesatuan dari seluruh anggota di dalamnya untuk kepentingan Soeharto untuk berkuasa.

### **F. Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Logos Wacana Ilmu.
- Amal, I. (1988). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Tiara Wacana.
- Arifin, M. Z., Jumadi, J., & Najamuddin, N. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973. *Jurnal Patingalloang*, 5(3), 101-111.
- Bulkin, F. (1991). *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia* (Cet. 3). LP3ES.
- Crouch, H. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia* (T. Sumantha (ed.); 2nd ed.). Sinar Harapan.
- Effendy, B., Thohari, H. Y., Novianto, K., Alfian, M. A., Nubowo, A., & Danial, A. (2012). *Beringin Membangun, Sejarah Politik Partai Golkar* (I. Thaha (ed.)). Grafindo Khazanah Ilmu.

- Gaffar, A. (1993). *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia*. Aditya Media.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah* (Ed.2 Cet 5). UI Press.
- Kartodirjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sejarah Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah* (M. Yahya (ed.); 1st ed.). Tiara Wacana.
- Liddle, R. W. (1992). *Partisipasi & Partai Politik : Indonesia pada Awal Orde Baru*. Pustaka Utama Grafiti.
- Pratignyo, I. (1984). *Ungkapan Sejarah Lahirnya Golongan Karya*. Yayasan Bhakti.
- Reeve, D. (2013). *GOLKAR : Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika*. Komunitas Bambu.
- Selfi, M. R. R. L. M. (2020). M . Jusuf dalam Meredam Gerakan DI / TII di Sulawesi Selatan 1957-1965. *PATTINGALLOANG: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan*, 7(2), 188-199.
- Suryadinata, L. (1992). *Golkar dan Militer : Studi Tentang Budaya Politik*. LP3ES.
- Tandjung, A. (2008). *The Golkar Way : Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Gramedia.
- Varma, S. . (1992). *Teori Politik Modern* (T. Effendi (ed.); 1st ed.). Rajawali.